

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan berperan sebagai media utama guna mengungkapkan informasi keuangan yang relevan, andal, serta bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan harus memenuhi karakteristik relevansi, representasi wajar, keterbandingan, dan kemudahan dipahami (Yadiati & Mubarak, 2017). Dengan demikian, penyajian laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan organisasi, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk entitas publik yang wajib menyajikan laporan keuangan secara terbuka. Ketentuan tersebut tercantum pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur seluruh entitas publik, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), wajib menyediakan akses terhadap informasi yang dikelola. Kewajiban ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menekankan kewajiban kepada jajaran direksinya untuk menyusun laporan secara bulanan, triwulanan, maupun tahunan. Dan juga, Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengatur laporan tahunannya wajib dipublikasikan paling lambat 15 hari kerja setelah memperoleh pengesahan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus berlandaskan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik agar setiap alokasi dana dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib berlandaskan pedoman keterbukaan dan akuntabilitas publik, hal tersebut bertujuan untuk menjamin setiap alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Devinci et al., (2022) menegaskan perlunya sistem pengelolaan keuangan yang terpadu. Dengan

demikian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengemban peran sebagai organisasi guna memajukan kesejahteraan publik melalui pengelolaan keuangan yang baik.

Namun, kondisi di Kota Cirebon menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan laporan keuangan yang andal. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cirebon tahun 2023 ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, diantaranya investasi jangka panjang pada Perusahaan Daerah Pembangunan yang tidak didukung oleh data yang memadai. Selain itu, hasil audit terhadap lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menunjukkan sebagiannya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Temuan tersebut menandakan masih adanya kelemahan dalam kualitas laporan keuangan.

Meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cirebon tahun 2022 dan 2023 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap memberikan catatan agar penyajian laporan semakin transparan, akuntabel, dan sesuai standar.

Kualitas laporan keuangan bergantung pada beragam faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berperan krusial dalam menjamin keterbandingan dan keandalan informasi laporan keuangan. Namun, hasil riset *Transparency International* Indonesia pada tahun 2023 melalui *Transparency in Corporate reporting* (TRAC) menunjukkan bahwa rata-rata skor transparansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hanya 2,7 pada skala 1-10, dengan hanya 17 dari 47 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapatkan skor diatas 5. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, yang mengharuskan pengungkapan terbuka untuk mencegah manipulasi laporan melalui interaksi transaksi dengan pihak berhubungan khusus.

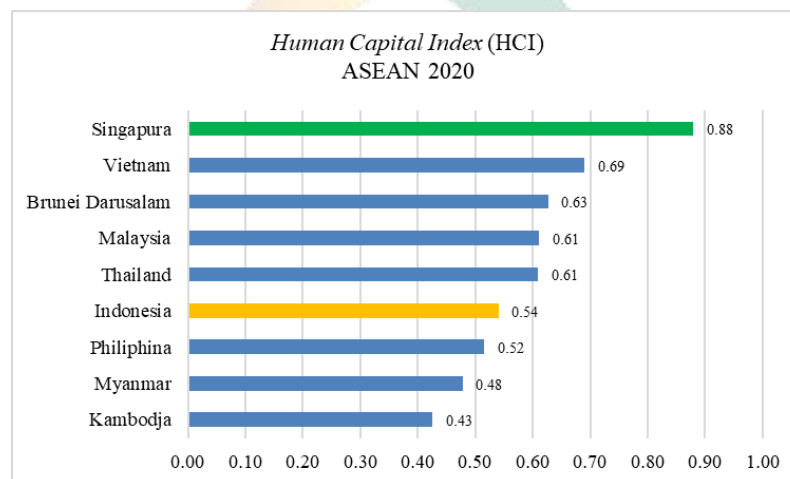
Fenomena serupa juga terlihat pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cirebon. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 Perusahaan Umum

Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam catatan 3.k point 2, yang menunjukkan adanya kerugian berulang dari aktivitas operasional dan berdampak pada timbulnya saldo defisit sebesar Rp6,8 miliar per 31 Desember 2023. Kondisi tersebut menggambarkan ketidakpastian material yang menimbulkan keraguan serius mengenai kemampuan perusahaan menjaga kelangsungan usaha. Selain itu, laporan keuangan tahun 2024 Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Kota Cirebon, khususnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) No. 3.p, terungkap bahwa bank belum melakukan perhitungan cadangan kewajiban imbalan kerja, baik bagi pengurus maupun pegawai. Kedua permasalahan tersebut menyebabkan laporan keuangan memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena belum sesuai dengan ketentuan SAK ETAP Bab 23 terkait Kewajiban Imbalan Pasca Kerja.

Kendala penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga secara nasional. Purba et al. (2025) menyebutkan bahwa hambatan implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) antara lain terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar akuntansi, minimnya tenaga akuntan yang kompeten, serta ketidakmerataan infrastruktur pendukung di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi akuntansi serta dukungan kebijakan yang memadai guna memastikan implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat berjalan optimal dan merata.

Mayoritas penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berperan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan entitas bisnis daerah maupun organisasi non publik. Penelitian Gea et al. (2024) menegaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat meningkatkan kejelasan, keterbandingan, dan relevansi laporan keuangan sehingga dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Temuan serupa ditunjukkan oleh Nastiti & Nevia (2023) pada koperasi, bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan meskipun konteks penelitiannya bukan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara khusus.

Selain penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai aset strategis organisasi yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja, yang berpotensi ditingkatkan melalui manajemen dan pelatihan berkelanjutan (Puspitasari & Dewi, 2023). Menurut Poceratu (2021), kompetensi sumber daya manusia meliputi dorongan, karakter, wawasan, serta kemampuan, yang berimplikasi terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, pertumbuhan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bagi staf yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan, menjadi peran utama dalam menghasilkan laporan yang relevan, akurat, dan sesuai standar.

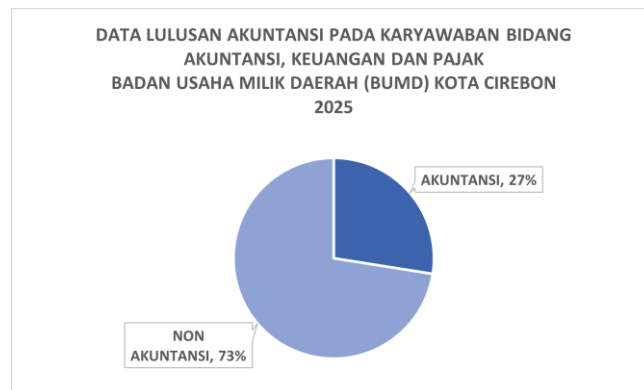


Gambar 1.1 Human Capital Index (HCI), ASEAN 2020

(Sumber: World Bank, 2021)

Namun, kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan di Kota Cirebon masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan *Human Capital Index* (HCI) tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-6 diantara 9 negara ASEAN serta ke-96 dari 174 negara (BPS, 2023). Berdasarkan *Human Development Report* tahun 2022, Indonesia berada di urutan ke-112 dari 193 negara dengan perolehan skor 0,713, masih di bawah rata-rata global 0,793. Pada tingkat daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon berada pada urutan ke-6 dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2024 dengan perolehan skor 77,08 (BPSDM, 2024). Kondisi

tersebut mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kota Cirebon masih perlu ditingkatkan.



Gambar 1.2 Data pegawai BUMD Kota Cirebon

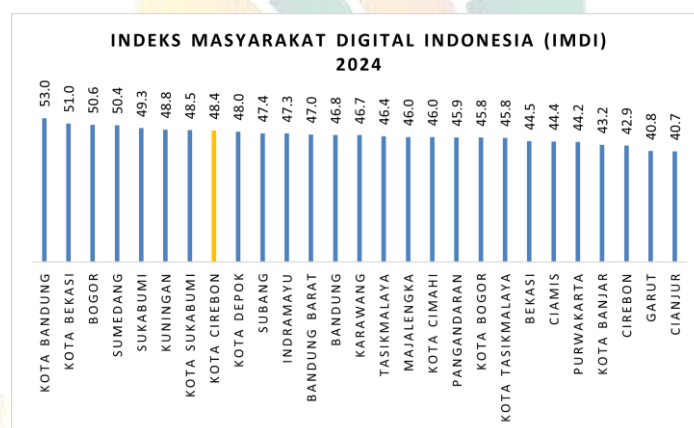
(Sumber: Data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cirebon yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata, Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan, Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai, dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Cirebon, diperoleh data bahwa hanya 27% pegawai pada bidang akuntansi, keuangan, dan pajak merupakan lulusan akuntansi, sedangkan 73% lainnya berasal dari latar belakang non-akuntansi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon belum sepenuhnya optimal. Rendahnya proporsi lulusan akuntansi berpotensi memengaruhi kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena pemahaman terhadap prinsip, standar, serta praktik akuntansi yang baik sangat bergantung pada keahlian dan latar belakang pendidikan yang relevan.

Pertiwi et al. (2025) menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan aspek penting yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Aspek tersebut berperan dalam meningkatkan keandalan informasi, mendukung transparansi, serta memastikan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, akuntabilitas sektor publik dapat terwujud melalui penyajian laporan yang akurat, relevan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa penelitian sebelumnya juga memperlihatkan adanya perbedaan temuan terkait kontribusi kompetensi sumber daya manusia terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil riset Pertiwi et al. (2025) dan Safitri et al. (2023) mengatakan kompetensi sumber daya manusia memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, hasil riset Faisal et al. (2023) dan Putri et al. (2024) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia tidak berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut terhadap kompetensi sumber daya manusia.

Selain kompetensi sumber daya manusia, faktor lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan digitalisasi keuangan. Perkembangan perekonomian Indonesia berjalan seiring dengan peningkatan penerapan digitalisasi pada sistem keuangan. Namun, proses digitalisasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan digital, serta kebutuhan akan sistem yang adaptif terhadap kondisi perekonomian (Burhanuddin et al., 2022).



Gambar 1.3 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024

(Sumber: Badan Pengembangan SDM Komdigi, 2024)

Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Berdasarkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024, Kota Cirebon memperoleh skor 48,39 (kategori tinggi) dan menempati peringkat ke-8 dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Meskipun sudah

termasuk tinggi, capaian tersebut masih tertinggal dibandingkan Kota Bandung (52,99) dan Kota Bekasi (51,01). Artinya, pemanfaatan digitalisasi dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon belum sepenuhnya optimal.

Isu keamanan data digital menjadi salah satu tantangan krusial dalam implementasi digitalisasi di sektor publik. Berdasarkan laporan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, tercatat sekitar 1,20 juta serangan siber terjadi pada Januari 2025 terhadap situs resmi pemerintah daerah (DPRD Kota Cirebon, 2025). Angka tersebut menunjukkan tingginya ancaman terhadap sistem keamanan digital pemerintah daerah yang juga dapat berdampak pada keamanan data dan keandalan sistem informasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun digitalisasi telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun aspek keamanan data masih perlu diperkuat agar proses pengelolaan keuangan dan pelaporan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berjalan secara aman, akurat, dan berkelanjutan.

Penelitian Lusiana (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, serta transparansi dalam pelaporan keuangan. Namun, temuan tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Rizki et al. (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan digitalisasi akuntansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa dampak digitalisasi terhadap kualitas laporan keuangan masih inkonsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kuat.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada entitas non-BUMD, seperti yang ditunjukkan oleh Chairunnisa et al., (2023) yang melakukan penelitian pengaruh penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung, penelitian oleh Ayem & Nugroho (2020) melakukan

penelitian Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik terhadap kualitas laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Purworejo, dan penelitian Dewi (2025) yang meneliti Pengaruh kepatuhan pada Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, penelitian yang berfokus di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih terbatas.

Di sisi lain, penelitian yang membahas kompetensi sumber daya manusia menunjukkan temuan yang bervariasi. Pertiwi et al. (2025) dan Safitri et al., (2023) menegaskan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Faisal et al., (2023) dan Putri et al. (2024) menerangkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian tentang digitalisasi keuangan memperlihatkan hasil yang belum konsisten, hasil penelitian Lusiana (2024) memaparkan bahwa kualitas laporan keuangan terbukti dipengaruhi oleh digitalisasi, namun berbanding terbalik dengan hasil riset yang dilakukan oleh Rizki et al. (2024).

Kebaruan (*novelty*) penelitian penulis terletak pada analisis yang menelaah pengaruh penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan digitalisasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada satu atau dua variabel, penelitian ini menghadirkan pendekatan komprehensif dengan objek khusus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon, yang hingga kini masih jarang menjadi fokus kajian empiris. Dengan demikian, penelitian penulis diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah baru dalam literatur akuntansi sektor publik serta rekomendasi praktis bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Digitalisasi Keuangan**

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon”.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada informasi latar belakang diatas, masalah-masalah yang ada saat ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tidak seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon telah sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Seperti, laporan keuangan tahun 2023 Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai dan laporan keuangan tahun 2024 Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Kota Cirebon belum menghitung cadangan kewajiban imbalan kerja sesuai dengan ketentuan SAK ETAP Bab 23 mengenai imbalan kerja. Sehingga Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai dan BPR Bank Kota Cirebon mendapatkan opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon belum optimal.
2. Kompetensi sumber daya manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan. Berdasarkan *Human Capital Index* tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-6 di ASEAN, sedangkan dalam *Human Development Report* tahun 2022, Indonesia terletak di posisi ke-112 dari 193 negara dengan nilai Human Capital Indeks (HDI) 0,713, di bawah rata-rata global. Pada level daerah, Indeks Pengembangan Manusia (IPM) Kota Cirebon tahun 2024 menempati peringkat ke-6 dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cirebon, diperoleh data bahwa hanya 27% pegawai pada bidang akuntansi, keuangan, dan pajak merupakan lulusan akuntansi, sedangkan 73% lainnya berasal dari latar belakang non-akuntansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia termasuk di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja organisasi.
3. Pemanfaatan digitalisasi keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon masih menghadapi kendala, terutama terkait literasi dan

kesiapan digital. Berdasarkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024, Kota Cirebon memperoleh skor 48,39 (kategori tinggi), namun masih tertinggal dibandingkan kota lain seperti Bandung dan Bekasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi keuangan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum optimal serta berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

4. Hasil opini audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cirebon tahun 2023 masih ditemukan kelemahan dalam pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan, serta investasi jangka panjang yang tidak didukung data andal pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon. Selain itu, Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Cirebon pada tahun 2023 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang mencerminkan adanya kendala dalam penerapan standar akuntansi.

C. Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon, dengan tujuan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan digitalisasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pada penelitian ini dibatasi pada dimensi relevansi, keandalan, keterbandingan, dan dapat dipahami sebagaimana karakteristik kualitatif laporan keuangan. Faktor lain di luar variabel tersebut, seperti sistem pengendalian internal, kepemimpinan, maupun budaya organisasi, tidak dibahas lebih lanjut karena tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian dan untuk menjaga fokus penelitian agar lebih terarah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah dijelaskan diatas, perumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon?
3. Apakah pemanfaatan digitalisasi keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah, tujuan penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon.
- b. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon.
- c. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan digitalisasi keuangan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, berikut ini disajikan manfaat dari penelitian ini:

- a. Bagi akademik

Penelitian ini memberikan pemahaman ilmiah, khususnya pada bidang akuntansi sektor publik. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur sekaligus menjadi dasar bagi penelitian berikutnya yang membahas aspek yang memengaruhi kualitas laporan keuangan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau entitas pemerintah lainnya.

b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Hasil penelitian dapat berfungsi sebagai panduan strategis guna meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan digitalisasi keuangan secara optimal. Dengan demikian, manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini berfungsi sebagai pengalaman praktis dan pengembangan kompetensi akademik dalam menerapkan metode penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil penelitian di bidang akuntansi sektor publik. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar atau rujukan bagi penelitian lanjutan untuk menguji variabel lain yang berperan dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan.

d. Bagi pembaca atau masyarakat umum

Penelitian ini menyajikan informasi secara komprehensif mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga memperluas pemahaman terkait keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di sektor publik.

F. Sistematika Penulisan

Maksud dari sistematika penulisan adalah guna memberikan pemahaman dan ringkasan yang lebih baik kepada pembaca tentang penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis. Susunan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menyajikan deskripsi umum terkait permasalahan penelitian, mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, menyajikan rangkuman teori yang dijadikan acuan peneliti dalam menjawab berbagai isu, antara lain teori mengenai kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan digitalisasi keuangan. Bab ini juga menyajikan ulasan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, memaparkan teknik yang diterapkan dalam penelitian, mencakup populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis serta sumber data, cara pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan periode penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, memaparkan temuan penelitian yang dihasilkan melalui pengolahan data, kemudian dianalisis dan diuraikan secara mendalam.

BAB V PENUTUP, adalah bagian penutup yang memuat simpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian atau praktik selanjutnya.